

**PENGAWASAN BIBLIOGRAFI
TERHADAP BUKU ISLAM TERBITAN INDONESIA**
(Studi terhadap cantuman buku-buku Islam dalam BNI dan KDT tahun 2000-2005)

Oleh: Siti Maryam, M.Hum

Abstrak

This article discussed a result of quantitative analysis descriptive approach focused on conducting attitude of Islamic book publisher in Jakarta to the *Legal Deposit* (UU RI. No. 4/1990) and the concept of bibliographic control and its correlation with the Islamic book entries in BNI (*Bibliografi Nasional Indonesia=Indonesian National Bibliography*) and KDT (*Katalog Dalam Terbitan = Cataloging in Publication*, held in 2007). The results of this research indicated that there is no correlation between the Islamic book publishers attitude's to the *Legal Deposit* with the Islamic book entries both in BNI and KDT, and the Islamic book publisher's attitude did not give a significant contribution to Islamic book entries both in the BNI and KDT.

Kata kunci: pengawasan bibliografi, buku Islam, Perpustakaan Nasional, Bibliografi Nasional Indonesia(BNI), Katalog Dalam Terbitan (KDT), sikap penerbit

A. Pendahuluan

Perkembangan penerbitan buku-buku Islam di Indonesia pada dekade 1990-an mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sebagai bagian dari khazanah Nasional maka literatur Islam tersebut harus dapat terawasi dengan baik. Tulisan ini berupaya untuk melihat sejauh mana upaya pengawasan bibliografi terhadap buku Islam tersebut, yaitu dengan menganalisa cantuman buku-buku Islam dalam Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dan Katalog Dalam Terbitan (KDT) yang terbit pada tahun 2000-2005, lalu penulis juga berupaya memaparkan seberapa besar pengaruh sikap penerbit buku Islam terhadap UU No. 4/1990 terhadap cantuman buku Islam dalam BNI tersebut. Tulisan ini disarikan dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada tahun 2007.

B. Pengawasan Bibliografi

British Library Association pada tahun 1964 mendefinisikan bahwa pengawasan bibliografi adalah usaha-usaha pengembangan dan pemeliharaan atas suatu sistem pencatatan dari semua bentuk bahan, baik

bahan yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, bahan audio-visual ataupun bahan-bahan lainnya yang dapat menambah khazanah pengetahuan dan informasi (Davinson, 1981: 7). Empat tahun sebelumnya UNESCO dan *Library of Congress* telah mengemukakan defenisi yang lebih detail dan rinci, bahwa pengawasan bibliografi terkait erat dengan efektivitas akses terhadap bahan-bahan itu sendiri. Jadi bibliografi disusun sedemikian rupa sehingga para pemakai dokumen diarahkan pada keberadaan dokumen-dokumen tersebut, ini yang paling utama dan menjadi tujuan akhir dari pengawasan bibliografi.

“Bibliographical control is defined to mean the mastery over written and published records which is provided by and for the purposes of bibliography. Bibliographical control is synonymous with effective access through bibliographies. Thus a reference to the bibliographic control of medicine means effective access through bibliographies to sources of medical information.” (Davinson, 1981: 7-8).

Definisi tersebut menghubungkan pengawasan bibliografi dalam suatu konsep yang lebih luas.

Kigongo-Bukenya (2000: 1) mengemukakan hal sama, bahwa pengawasan bibliografi merupakan suatu konsep dimana penerbitan suatu negara harus secara sistematis direkam dan menghasilkan suatu rekaman bibliografi yang diterbitkan dan disajikan kepada para *potencial user* (pemakai potensial). Selanjutnya Davinson menjelaskan bahwa pengawasan bibliografi dibutuhkan sebagai bentuk pengontrolan (pengawasan) atas terjadinya *literature explosion* yaitu peningkatan pertumbuhan jumlah literatur yang luar biasa pesat. Jika tidak ada pengawasan bibliografi maka tidak mungkin pertumbuhan literatur yang sedemikian pesat dan tinggi dapat terkontrol dengan baik. Hasil akhir pengawasan bibliografi adalah pola susunan efektif yang dihasilkan berupa daftar sistematis bibliografi.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan bibliografi merupakan suatu usaha untuk mendaftar (mencatat) semua bentuk bahan (tercetak maupun non cetak, diterbitkan maupun tidak, berbentuk bahan audio visual, dan bahan-bahan lainnya) yang dapat menambah khasanah informasi dan pengetahuan, dan tujuan akhirnya adalah menyediakan sarana akses yang efektif bagi para pengguna terhadap bahan atau dokumen-dokumen tersebut. Maka secara lebih rinci dapat dijelaskan berdasarkan definisi di atas bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui pengawasan bibliografi adalah sebagai berikut:

1. Mengontrol seluruh produk penerbitan yang ada di suatu negara, baik penerbitan pemerintah maupun swasta. Melalui pengawasan bibliografi akan dapat diketahui semua jenis penerbitan yang ada baik yang tercetak maupun non cetak,

2. Melestarikan seluruh produk penerbitan yang ada di suatu negara, yang berarti pula melestarikan produk budaya dan ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan oleh suatu bangsa,
3. Menyediakan sarana akses yang efektif bagi pengguna terhadap seluruh produk penerbitan yang ada di suatu negara, sekaligus sarana penyebaran informasi mengenai seluruh penerbitan tersebut. Diharapkan dengan penyebaran ini maka tingkat akses dan pemanfaatan berbagai produk penerbitan akan meningkat, dan pada akhirnya menghasilkan berbagai produk penerbitan baru, sehingga terjadi perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

1. Fungsi Pengawasan Bibliografi

Telah diuraikan di atas bahwa pengawasan bibliografi merupakan usaha untuk mengawasi atau mengontrol terjadinya *literature explosion* dengan tujuan untuk mencatat semua jenis bahan yang pernah terbit dan menyediakan akses bagi masyarakat terhadap bahan-bahan tersebut. Maka pengawasan bibliografi memiliki beberapa fungsi penting. Menurut Hagler (Taylor, 1999: 2-5) setidaknya ada enam fungsi pengawasan bibliografi, yaitu:

- a) Mengidentifikasi keberadaan semua jenis informasi yang dihasilkan. Suatu buku atau *website* mungkin saja telah diterbitkan atau diluncurkan tetapi jika tidak ada seorangpun yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang terlibat dalam penciptaannya, maka ia tidak akan berguna bagi siapapun. Keberadaan dan identitasnya akan dapat diketahui melalui beberapa cara, misalnya peluncuran buku baru, peluncuran *website*, *review*, daftar subjek terkait, dan lain-lain. Sebagian besar penerbit membuat

- katalog untuk mendaftar produk atau terbitan mereka.
- b) Mengidentifikasi karya-karya yang memuat suatu informasi baik sebagai entitas tersendiri maupun sebagai bagian dari karya tersebut. Suatu koleksi cerita pendek atau suatu pengelompokan karya-karya artistik mungkin dianggap sebagai suatu entitas informasi secara keseluruhan, tetapi bisa jadi masing-masing cerita individu atau karya-karya artistik bisa dianggap sebagai entitas informasi tersendiri.
 - c) Mengumpulkan berbagai informasi secara sistematis ke koleksi perpustakaan, kearsipan, file internet, dan bentuk lain yang sejenis misalnya depository (penyimpanan). Secara tradisional aktivitas ini telah dipikirkan dan dilakukan oleh berbagai institusi seperti perpustakaan, kearsipan, dan museum. Koleksi-koleksi tersebut mudah diketahui publik karena daftar-daftar telah disediakan di website. Seringkali sumber-sumber elektronik juga menjadi koleksi yang tidak dimiliki secara lokal, tetapi beberapa institusi membeli hak akses yang memungkinkan para pemakai menelusur sumber-sumber *online* tersebut.
 - d) Menghasilkan daftar informasi sesuai dengan aturan sitasi standar (*rule of citation*), misalnya bibliografi, indeks, katalog perpustakaan, sarana temu kembali arsip, dan daftar koleksi museum. Ini penting bagi temu kembali informasi, karena jika seseorang mencari bahan yang diketahuinya terutama bahan yang *tangible* dan memerlukan lokasi fisik, maka ia perlu menemukan di mana bahan tersebut terdaftar. Daftar dimaksud bisa berbentuk tercetak ataupun berbentuk elektronik.
 - e) Menyediakan titik akses ke berbagai informasi yang tersedia berupa nama pengarang, judul, atau subjek dan titik akses lainnya yang bermanfaat. Ini adalah titik akses paling bernilai bagi penggunaan dan penelusuran potensial suatu koleksi. Akses kata kunci dapat disajikan secara otomatis dan informasi apapun di dalam format elektronik dapat ditemukan dengan mencari suatu kata yang tampak pada kemas informasi elektronik.
 - f) Menyediakan petunjuk lokasi atau keberadaan dari masing-masing informasi atau menyediakan kopi dari informasi tersebut. Ini menjadi nilai tambah bagi institusi informasi seperti perpustakaan. Katalog atau daftar lain yang dibuat perlu memberi petunjuk mengenai penempatan fisik suatu informasi, sehingga setiap informasi tersedia dengan petunjuk lokasinya, dan akan mudah ditemukan kembali manakala diperlukan.

2. Peran Perpustakaan Nasional dalam Pengawasan Bibliografi

Perpustakaan nasional merupakan satu lembaga yang bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya pengawasan bibliografi terhadap seluruh terbitan yang ada di negara tersebut. Karenanya perpustakaan nasional bertanggung jawab untuk memperoleh dan memelihara salinan dari semua karya-karya penting yang terbit di suatu negara dan berfungsi sebagai perpustakaan deposit baik di depan hukum maupun di bawah peraturan lainnya. (Sulistiyo Basuki: 1).

Fungsi utama perpustakaan nasional adalah sebagai tempat menyimpan dan mengorganisasi semua bahan pustaka tercetak maupun terekam yang terbit di suatu negara (Tyulina, 1978:94), sehingga kegiatan pengumpulan, pengaturan, dan perawatan atas penerbitan-penerbitan nasional dari zaman ke zaman akan terjamin (Santoso, 2003: 11).

Terjaminnya pengawasan bibliografi nasional suatu negara menjadi landasan pokok bagi pengawasan bibliografi tingkat internasional atau universal (*universal bibliographic control*), yaitu usaha pengembangan dan pemeliharaan suatu sistem pencatatan terhadap semua publikasi yang ada di seluruh penjuru dunia.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) resmi berdiri pada tanggal 17 Mei 1980, bertugas untuk melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan bahan pustaka tertulis, tercetak dan terekam selengkapya baik yang terbit di Indonesia maupun di luar negeri sebagai khazanah kebudayaan bangsa dalam arti yang luas serta melaksanakan layanan untuk kepentingan pembangunan nasional dan kemajuan bangsa. Dengan peningkatan status PNRI sebagai LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) pada tanggal 6 Maret 1989 berdasarkan Kepres No.11/1989, dan bertanggungjawab langsung pada Presiden (Supriyanto, 2004), maka ditetapkan bahwa salah satu peran PNRI adalah sebagai salah satu sarana pelestari bahan pustaka yang merupakan hasil budaya, sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber informasi dan kebudayaan yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa serta menunjang pembangunan nasional.

Terkait dengan peran di atas maka tugas-tugas PNRI sesuai perundang-undangan yang berlaku (Sulistyo-Basuki, 1993: 43) tugas-tugas Perpustakaan Nasional terkait dengan pengawasan bibliografi antara lain adalah: a) bertanggung jawab atas pengadaan dan pelestarian seluruh hasil produksi tercetak di negaranya, b) melakukan koordinasi usaha-usaha untuk mendapatkan bahan luar negeri yang penting bagi negaranya, c) bertanggung jawab atas jasa dan layanan bibliografi negaranya, dan d) menyusun bibliografi nasional yang *up-to date*.

3. Sarana Pengawasan Bibliografi

Terkait dengan tanggungjawab Perpustakaan Nasional untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan bibliografi atas semua jenis penerbitan di Indonesia, maka diterbitkanlah suatu bibliografi nasional, yang berjudul *Bibliografi Nasional Indonesia* (BNI). Disamping itu Perpustakaan Nasional juga menerbitkan *Katalog Dalam Terbitan* (KDT) setiap tiga bulan sekali, ia berisi data buku-buku yang memiliki nomor ISBN (*International Standard Book Number*), artinya setiap buku yang diberi nomor ISBN melalui Perpustakaan Nasional maka akan tercantum dalam KDT tersebut.

Bibliografi nasional Indonesia yang pertama terbit pada tahun 1953 dengan judul *Berita dari Kantor Bibliografi Nasional*, diterbitkan oleh Kantor Pusat Bibliografi Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI tertanggal 11 Desember 1952 dengan fungsi sebagai lembaga yang mengumpulkan seluruh bahan tercetak yang ada dan menerbitkannya dalam daftar bulanan. Adapun sebelum tahun 1952 bibliografi Indonesia dikumpulkan dan diterbitkan oleh G. Ockeloen (Malckles, 1955: 47 & 167).

Dalam perkembangannya hingga tahun 1980-an kala terbit BNI masih bervariasi, pada tahun 1953-1962 BNI terbit bulanan (teratur), pada periode 1963-1972 terbit tidak teratur, dan ada pula yang terbit secara kumulatif, yaitu tahun 1945-1963, dan 1964-1972.

Adapun lembaga yang menerbitkan BNI tahun 1963-1967 adalah Biro Perpustakaan, tahun 1968-1975 Lembaga Perpustakaan Nasional, dan tahun 1975-1980 BNI diterbitkan oleh Proyek Pengembangan Perpustakaan Nasional.

Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 164/0/1980 mengenai pembentukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, maka sejak tanggal 17 Mei 1980 BNI (Bibliografi Nasional Indonesia) menjadi

tanggung jawab Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Manaf, 2000: 2).

Saat ini BNI terbit teratur dengan kala terbit tiga bulanan, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Sebagai sarana pengawasan bibliografi maka BNI memuat informasi mengenai semua terbitan baru yang ada di Indonesia dan disimpan di Perpustakaan Nasional sebagai koleksi deposit, baik penerbitan pemerintah, penerbitan swasta. Jenis terbitan yang dicantumkan dalam BNI adalah buku, laporan penelitian, buku teks, bacaan anak-anak, terbitan pemerintah, terbitan berkala baru, risalah konferensi dan peta. Bahan yang tidak dicantumkan dalam BNI adalah majalah hiburan yang tidak memiliki nilai informasi atau sejarah dan bahan yang tidak mempunyai asal-usul Indonesia, komik, dan poster (Manaf, 2000: 3). Dengan demikian semestinya semua buku Islam juga tercantum dalam BNI.

C. Buku dan Peradaban

Buku merupakan salah satu hasil peradaban manusia yang paling lama usianya. Buku merupakan media dimana manusia dapat merekam dan melestarikan berbagai hal mulai dari keyakinan, legenda, aktivitas sehari-hari, hingga merekam kemajuan ilmu pengetahuan. Bahkan dapat dikatakan pula bahwa buku itu sendiri merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan yang telah dicapai manusia.

Dalam sejarahnya yang begitu panjang buku memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan peradaban manusia. Disamping itu buku itu sendiri juga tumbuh dan berkembang seiring dan sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang dicapai manusia. Berbagai media telah digunakan manusia sebagai sarana untuk menulis mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling modern. Begitupun jenis atau tulisan juga mengalami perkembangan yang sama, mulai dari yang sederhana hingga bentuk-

bentuk huruf modern seperti yang kita kenal saat ini.

Menurut Knowlton (1997: 318-322) pada awalnya orang menggambar atau melukiskan berbagai pengetahuan, kepercayaan, atau legenda mereka pada dinding-dinding gua, batu karang, tanah liat dan sebagainya.

Kemudian berdasar perkembangan pengetahuan maka digunakan pula lontar. Bangsa Mesir menggunakan *papyrus*, dan bangsa lainnya telah mulai menggunakan *parchmen* (kulit binatang yang sangat tipis dan telah diproses, diregangkan dan digosok dengan batu apung) sebagai media untuk menulis.

Sementara orang Romawi menggunakan *caudex* yaitu papan-papan kayu tipis yang sisi-sisinya diberi lubang lalu digabungkan dengan melilitkan cincin di lubang tersebut untuk menulis. Kemudian penemuan kertas pada sekitar tahun 105 Masehi oleh Tsai Lun (bangsa Cina) menjadi temuan paling berarti bagi kegiatan penulisan dan perkembangan buku.

Sementara bentuk tulisan paling awal dikenal sebagai tulisan paku mulai ditemukan oleh bangsa Summerian sekitar sepuluh ribu tahun yang lalu, Dan bangsa Mesir pada sekitar 3.500 tahun SM telah mengembangkan tulisan Mesir kuno yang disebut *hieroglyph* atau *tulisan suci* pada lembaran-lembaran lontar atau *papyrus* (Knowlton (1997: 318)). Orang-orang Yunani juga telah mengembangkan bentuk tulisan dan pembuatan buku dengan penemuan abjad yang terdiri dari 24 simbol yang disebut huruf, masing-masing huruf merepresentasikan satu bunyi tertentu dari bahasa lisan.

Pada masa kegelapan Eropa produksi buku sempat mengalami penurunan dan terhenti yaitu sekitar tahun 476 setelah Roma jatuh. Dan baru pada tahun 1100 sebagian kecil masyarakat Kristen mulai menulis buku kembali yang disebut *monasteries*. Selanjutnya penulisan buku mengalami peningkatan yang pesat seiring dengan

dibukanya universitas-universitas dan perguruan tinggi di kota-kota di Eropa pada abad pertengahan. Ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg pada sekitar tahun 1450 telah memungkinkan pencetakan buku secara massal (Widjanarko, 2000: 25). Mesin-mesin cetak itu telah beredar di kota-kota besar Eropa pada tahun 1500 an dan lebih dari 10 juta salinan dari ribuan buku telah dicetak, sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, buku menjadi demikian berlimpah dan populer.

Jutaan orang mengembangkan perhatian dan keinginan untuk belajar dan membaca sejak tersedianya buku-buku. Seluruh buku yang diterbitkan sebelum tahun 1501 disebut *incunabula*. Selama 200 tahun lamanya bentuk buku modern dibuat dengan halaman-halaman kertas yang dijilid dengan sampul keras (*hardcover*), bentuk buku *paperback* baru diterbitkan pada tahun 1800-an, tetapi hingga kini buku-buku *paperback* masih merupakan bisnis yang besar (Knowlton, 1997: 322).

Selanjutnya seiring dengan kemajuan teknologi maka pada tahun 1930-an mulai dipopulerkan buku-buku berbentuk rekaman suara (*audio tape*), dimana aktor terkenal ataupun pengarang itu sendiri merekam apa yang mereka baca baik berupa buku fiksi maupun nonfiksi. Dari waktu ke waktu buku terus mengalami perkembangan yang signifikan baik dari segi jumlah, jenis kandungan atau isinya, maupun bentuk atau forma fisiknya. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini telah memungkinkan buku tidak hanya dicetak di atas kertas, tetapi dikembangkan menjadi buku digital dan bahkan sebagian besar dari buku-buku tersebut dapat diakses melalui internet.

Buku memiliki peran yang sangat penting terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selama berabad-abad bahkan sampai saat ini buku telah menjadi media rekam informasi dan ilmu pengetahuan yang cukup praktis dan paling banyak digunakan. Melalui buku peradaban manusia dibangun dan dikembangkan terus-

menerus. Berbagai gagasan-gagasan berharga dan semua perjalanan sejarah manusia terekam dalam buku-buku. Dengan menggunakan informasi dari buku-buku para cendekiawan dan ilmuwan telah mengeksplorasi dan mengembangkan hampir seluruh disiplin ilmu yang kita kenal. Jadi, sulit dibayangkan adanya suatu peradaban tanpa adanya buku.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa tanpa buku, mungkin saja ilmu kedokteran modern tidak muncul, tidak pula ilmu dan teknologi modern, dan mungkin saja televisi tidak muncul, tidak ada pendaratan di bulan, tidak ada guru, dan tidak akan ada sekolah. Jadi sebenarnya seluruh kebudayaan modern terbentuk, terbangun dan dikembangkan di atas kegiatan membaca buku (Leksono, 1999: 58).

Oleh karena itu secara singkat dapat dikatakan bahwa tanpa buku kehidupan modern seperti saat ini mungkin saja tidak akan pernah terwujud. Maka jelaslah bagi kita bahwa buku memiliki peran yang begitu penting dalam kehidupan manusia, dalam peradaban manusia, karena ia sekaligus merupakan produk dan pelestari peradaban itu sendiri.

Menurut Ignas Kleden (1999: 22-68) dipandang dari segi budaya buku memiliki tiga fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan, yaitu buku sebagai produk budaya (*cultural product*), buku sebagai bagian dari suatu tingkah laku budaya (*cultural behavior*), dan buku dipandang sebagai proses produksi budaya. Kleden menjelaskan bahwa sebagai produk budaya buku adalah sebuah benda yang menjadi perwujudan fisik dari pikiran, gagasan, perasaan, dan pengalaman manusia. Sebagai kebudayaan fisik dan dalam kedudukannya sebagai artifak buku merupakan benda fisik yang telah berdiri sendiri. Artinya buku merupakan suatu karya yang selesai, obyektif dan *fixed* tidak lagi tergantung pada pengarangnya, dan ia telah membuka diri untuk digunakan oleh orang lain yang mungkin saja memiliki pengertian dan maksud yang berbeda

bahkan bertentangan dengan maksud si penulis buku tersebut.

Disisi lain buku juga dapat dilihat sebagai bagian dari suatu tingkah laku, baik dari sudut pembaca maupun penulisnya. Dalam hal ini pembaca akan mencari informasi atau menambah pengetahuan ataupun mencari hiburan dengan cara membaca buku-buku. Sebagai proses produksi budaya, maka menulis buku berarti membekukan dan membakukan pikiran dan perasaan secara fisik dalam aksara. Dengan menulis buku melalui fiksasi fisik melalui huruf maka wacana lisan dibuat tidak lagi berubah, apa yang sudah tertulis tidak akan hilang. Dan berkat tulisan (buku) maka karya-karya bahasa menjadi sama mandiriya dengan sebuah hasil pahatan.

D. Perkembangan Buku Islam di Indonesia

Karena belum ada definisi yang jelas tentang apa itu buku Islam, maka dalam tulisan ini yang dimaksud buku Islam adalah kategori buku-buku yang kandungan isinya meliputi apa yang tercantum dalam *Sistem Klasifikasi Islam: Adaptasi dan Perluasan DDC Seksi Islam* (diterbitkan oleh Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI). Cakupan buku tersebut adalah subjek-subjek bidang kajian ke-Islaman yang terdiri dari sepuluh kelas besar berikut:

- a) Studi Islam (secara umum),
- b) Al-Qur'an, tafsir, dan ilmu yang berkaitan,
- c) Hadits dan ilmu yang berkaitan,
- d) Aqid dan Ilmu Kalam (Teologi Islam),
- e) Fikih dan Hukum Islam,
- f) Akhlak dan Tasawuf,
- g) Sosial, Poliyik dan Budaya Islam,
- h) Filsafat dan Perkembangan Islam,
- i) Aliran dan Sekte Islam, dan
- j) Sejarah dan Biografi Islam.

Pasang surut perkembangan buku-buku Islam di Indonesia sama halnya yang dialami oleh penerbitan jenis buku lainnya.

Penerbitan buku-buku Islam sudah dimulai sejak tahun 1940-an. Penerbit Al-Ma'arif yang didirikan pada 1949 oleh Baharthah (seorang imigran dari Hadrami), tahun 1951 didirikan Penerbit Bulan Bintang oleh Abdul Manaf Zamzami (lebih dikenal sebagai Amelz). Bulan Bintang banyak menerbitkan buku-buku terjemahan dan buku karya-karya tokoh Islam nasional seperti Hasbi As-Shiddieqy, A. Hasjmy, Hamka, Syafruddin Prawiranegara, dan penulis lainnya. Pada dekade 1960 hingga 1970 an, bahkan Bulan Bintang sempat menjadi penerbit Islam paling penting di Indonesia, tetapi pamornya menurun pada tahun 1980-an (Wijanarko, 2003: 20-21).

Pertumbuhan literatur Islam mulai bangkit pada tahun 1980-an, seiring dengan peningkatan aktivitas generasi muda di masjid-masjid kampus seperti di Masjid Salman (ITB), Masjid Arief Rahman Hakim (UI), Masjid Al-Ghifari (IPB) dan Jemaah Shalahuddin (IPB). Beberapa penerbit buku Islam lahir dari aktivitas tersebut (Wijanarko, 2003: 20), yaitu Pustaka Salman (1980), Shalahuddin Press (1983), Mizan (1983), dan Gema Insani Press (1986). Topik buku Islam terbit pada periode ini juga jauh lebih bervariasi dari sebelumnya, seperti buku pemikiran dan politik Islam, ekonomi Islam, seni dan budaya Islam, filsafat Islam, dan sebagainya. Pada dekade 1980 an ini toko-toko buku seperti Gramedia dan Gunung Agung mulai menyediakan tempat yang cukup besar bagi buku-buku Islam.

Memasuki tahun 1990-an penerbitan buku-buku Islam di Indonesia tumbuh semakin pesat. Indikatornya adalah meningkatnya jumlah buku-buku Islam secara signifikan dalam kegiatan-kegiatan pameran buku. Bahkan sejak tahun 2000 Ikatan Penerbit Indonesia Cabang Jakarta (IKAPI Jaya) telah menggelar pameran khusus buku-buku Islam. Pameran yang sama pada tahun 2002 diikuti oleh 24 penerbit yang memproduksi buku-buku Islam, dan pada tahun 2003 jumlah pesertanya meningkat dua kali lipat hingga mencapai 48 penerbit. Dan pada bulan

Oktober tahun 2003 IKAPI Jawa Barat juga menyelenggarakan Pameran Buku Plus yang juga banyak sekali memamerkan buku-buku bertemakan ke-Islaman. Bukti lain ialah data IKAPI yang menunjukkan bahwa pada periode 2000 hingga 2003 telah lebih dari 20 penerbit buku Islam baru telah tergabung menjadi anggota IKAPI, sedangkan pada periode 1981 hingga 1989 jumlahnya hanya enam penerbit saja. Jumlah tersebut belum termasuk penerbit yang tidak menjadi anggota IKAPI (Kompas, 2003:15 Nopember, h. 40).

Penerbitan buku Islam di Indonesia tersebut telah memperkaya khazanah intelektual di tanah air. Sebagai bagian dari penerbitan di Indonesia dan agar dapat diakses secara maksimal oleh masyarakat yang memerlukannya maka seluruh penerbitan buku Islam tersebut seharusnya dapat terawasi dengan baik. Dalam hal ini tentu diperlukan kerjasama antara Perpustakaan Nasional dan para penerbit buku-buku Islam, yaitu dengan mentaati ketentuan undang-undang yang berlaku terkait dengan buku.

E. Pengawasan Bibliografi Buku Islam di Indonesia

1. Upaya Yang Telah Dilakukan

Pengawasan bibliografi merupakan wujud perhatian yang besar terhadap eksistensi dan perkembangan buku, berupa upaya-upaya untuk melestarikan, mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang buku itu sendiri. Pengawasan bibliografi merupakan hal penting yang harus dilakukan sebagai upaya mengidentifikasi, menginformasikan kembali dan melestarikan berbagai penerbitan yang telah ada. Kehadiran buku-buku Islam yang telah memperkaya khazanah intelektual masyarakat muslim khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, seharusnya terekam dan terkontrol dengan baik melalui pengawasan bibliografi (*bibliographic control*) ini.

Beberapa usaha yang dilakukan dalam kerangka pengawasan bibliografi

terhadap buku-buku Islam yang terbit di Indonesia pernah dilakukan oleh beberapa pihak salah satu diantaranya oleh Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Majalah Tempo, yaitu dengan menerbitkan *Indeks Buku-buku Agama* yang dimiliki Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi majalah Tempo sejak tahun 1980. Indeks tersebut diterbitkan secara khusus pada ulang tahun yang ke-16 majalah berita tersebut. Indeks tersebut tentu tidak lengkap, ia hanya mencantumkan 809 judul baru buku Islam yang diterbitkan selama 1980 hingga 1987. Sementara Pusat Informasi Islam Yayasan Masagung pada tahun 1987 dan 1988 juga menerbitkan indeks yang sama. Ia mencatat buku-buku Islam koleksi Yayasan Idayu sejak 1945 (Wijanarko, 2000: 22).

Disamping itu, pada tahun 2004 Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan IAIN Sunan Ampel Surabaya telah membentuk *Indonesian Islamic Bibliographic Network* (IIBN). IIBN ini berupaya menggabungkan seluruh data-data bibliografi buku Islam dari seluruh koleksi perpustakaan yang ada dalam naungan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dengan demikian maka yang dicantumkan tidak hanya data buku Islam yang diterbitkan di Indonesia saja, tetapi juga meliputi buku-buku Islam terbitan di luar Indonesia yang telah menjadi koleksi di perpustakaan perguruan tinggi Islam yang tergabung dalam IIBN tersebut.

Pencatatan mengenai buku-buku Islam ini telah menjadi perhatian penting tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain. Di Canada misalnya pencatatan terhadap buku Islam ini pernah dilakukan oleh McGill University Graduate School of Library and Information Science. Program tersebut dilaksanakan dalam kerangka *Indonesia-Canada Islamic Higher Education Project*. Dari kegiatan tersebut pada tahun 1997 berhasil diterbitkan sebuah bibliografi Islam dalam bentuk CD-ROM berjudul *The Islamic Book*. Bibliografi tersebut tidak hanya menampilkan data bibliografis saja tetapi menampilkan

dokumen secara *fulltext*, dan untuk aksesnya disediakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab.

2. Cantuman Buku Islam dalam BNI dan KDT 2000-2006

Pembahasan ini merupakan hasil penelitian yang penulis lakukan pada tahun 2007 terhadap *Bibliografi Nasional Indonesia* (selanjutnya disebut BNI) terbitan tahun 2000-2006. BNI yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2000-2006 berjumlah 28 nomor, tetapi penulis hanya memperoleh 23 nomor saja, lima 5 (lima) nomor tidak penulis temukan, yaitu nomor 4 tahun 2000, dan semua nomor tahun 2004 (volume 52). Analisa terhadap cantuman buku Islam dalam BNI tersebut dilakukan dengan cara mencatat ulang seluruh data terbitan tentang ke-Islaman baik berupa buku, tesis, terbitan berkala, laporan penelitian dan bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya, sesuai dengan topik tulisan ini maka penulis kemudian hanya menghitung jumlah terbitan dalam format buku saja, sedangkan bentuk lainnya (tesis dan terbitan berkala) tidak dihitung.

Tabel 1
Jumlah Cantuman Buku Islam dalam BNI
Tahun 2000-2006

Thn	V o l	Jumlah Cantuman/nomor				Jumla h	Pres enta si (%)
		1	2	3	4		
2000	48	18	38	44	-	100	9%
2001	49	35	64	103	62	264	23%
2002	50	23	51	52	35	161	14%
2003	51	46	35	59	41	181	16%
2004	52	-	-	-	-	-	0%
2005	53	36	22	84	47	189	17%
2006	54	52	37	66	92	247	22%
Jumlah Total						1142	100%

Hasil diketahui bahwa jumlah total terbitan buku Islam yang tercantum dalam seluruh BNI tersebut adalah sebanyak 1142 judul (cantuman). Variat tertinggi adalah sebanyak 103 judul terdapat pada BNI volume 49 nomor 3 tahun 2001, sedangkan variat terendah adalah sebanyak 18 (pada BNI volume 48 nomor 1 tahun 2000). Adapun rerata jumlah cantuman buku Islam dalam BNI tahun 2000-2005 adalah 50 judul per nomor BNI (1142 dibagi 23), atau setara dengan 190 judul per tahun (1142 dibagi 6). Jadi jumlah cantuman buku Islam dalam BNI terbitan 2000-2006 cukup bervariasi, dimana jumlah tertinggi sebanyak 264 judul terdapat pada BNI tahun 2001, dan jumlah cantuman yang paling sedikit adalah pada BNI terbitan 2005 yakni 189 judul (17%).

3. Cantuman Buku Islam dalam KDT

Adapun jumlah total cantuman buku Islam di dalam *Katalog Dalam Terbitan (KDT)* tahun 2000-2005 adalah 616 cantuman, dan apabila dibuat persentase berdasarkan tahun maka hasilnya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut ini:

Tabel 4.9
Data Cantuman Buku Islam dalam KDT

Tahun	Jumlah KDT	Jumlah Cantuman	Persentase
2000	3 nomor	160	26 %
2001	4 nomor	145	24 %
2003	3 nomor	141	23 %
2004	3 nomor	170	28 %
Total	13 nomor	616	100 %

Dalam tabel tersebut tampak jumlah tertinggi cantuman buku Islam dalam KDT adalah 160 (26% dari jumlah total) terdapat pada KDT terbitan tahun 2000, sementara jumlah terendah adalah 141 cantuman (23%) terdapat pada KDT tahun 2003. Perlu dicatat disini bahwa tahun 2002 dan tahun 2005 karena tidak diperoleh datanya maka tidak dimasukkan dalam hitungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cantuman buku Islam dalam KDT tahun 2000 hingga 2005 cukup bervariasi, dengan

rata-rata sebanyak 154 cantuman setiap tahun (616 : 4).

Dengan memperhatikan perbedaan jumlah rata-rata cantuman buku Islam dalam BNI dan KDT di atas, maka dapat dikatakan bahwa frekuensi cantuman buku Islam dalam BNI lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi cantuman buku Islam dalam KDT.

F. Faktor Pendukung

Dalam pengawasan bibliografi terhadap buku-buku Islam di Indonesia terdapat tiga komponen yang saling terkait erat dan saling mempengaruhi atau mendukung. *Pertama*, Perpustakaan Nasional sebagai institusi penyelenggara pengawasan bibliografi, *kedua*, UU RI No. 4/1990 sebagai peraturan legal formal, dan *ketiga* adalah penerbit-penerbit buku Islam sebagai wajib hukum. Sebagai wajib hukum para penerbit buku Islam memiliki peran yang sangat menentukan dalam kegiatan pengawasan bibliografi buku Islam di Indonesia. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk ketaatan dan kesadaran mereka terhadap undang-undang tersebut, dan hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap undang-undang tersebut. Apabila para penerbit bersikap positif maka pengawasan bibliografi akan meningkat, dan sebaliknya apabila bersikap negatif maka pengawasan bibliografi akan menurun.

a. Undang-Undang Deposit

Untuk mendukung dan menjamin terlaksananya pengawasan bibliografi di Indonesia maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan *Undang-undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam*, yang lebih dikenal sebagai undang-undang deposit. Undang-undang ini diundangkan dan diberlakukan mulai tanggal 9 Agustus 1990. Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam kerangka pelestarian dan penyebarluasan khazanah intelektual yang berkembang di Indonesia

Dalam undang-undang tersebut setiap penerbit yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menyerahkan dua kopi dari setiap bahan yang diterbitkannya kepada Perpustakaan Nasional RI, dan satu kopi kepada Perpustakaan Daerah yang bersangkutan (pasal 2 dan 3). Kewajiban tersebut berlaku pula bagi setiap warga negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri (pasal 4). Bahan-bahan deposit inilah yang kemudian dicantumkan datanya dalam *Bibliografi Nasional Indonesia* (BNI). Pelaksanaan dari undang-undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1991, tertanggal 28 Desember 1991.

Dengan adanya undang-undang deposit beserta peraturan pelaksanaannya tersebut diharapkan Perpustakaan Nasional dapat melaksanakan pengawasan bibliografi terhadap setiap bahan atau buku yang diterbitkan di Indonesia dengan baik. Di sisi lain para wajib simpan juga dituntut untuk mematuhi perundangan tersebut, jika tidak maka pengawasan bibliografi tidak akan dapat berjalan maksimal. Oleh karena itu maka kerjasama dari pihak penerbit sebagai wajib simpan mutlak diperlukan dalam upaya pengawasan bibliografi tersebut.

b. Sikap Penerbit Buku Islam

Penelitian ini disamping menganalisa jumlah cantuman buku Islam dalam BNI juga berupaya mengeksplorasi bagaimana sikap penerbit buku Islam terhadap UU No. 4 tahun 1990 tentang wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam. Sepuluh penerbit buku Islam yang ada di Jakarta menjadi responden penelitian ini, mereka mewakili penerbit tua dan penerbit muda. Para penerbit buku Islam tersebut memiliki perbedaan pada aspek usia, ciri khas kategori buku yang diterbitkan, dan jumlah rata-rata buku yang diterbitkan setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat pada table berikut:

Tabel 2
 Profil Responden (Penerbit Buku Islam Jakarta)

No	Nama Penerbit	Tahun Berdiri	Jenis Terbitan Utama	Jumlah Rata-rata terbitan/tahun
1.	Bulan Bintang	1956	Buku Islam ilmiah (<i>textbooks</i>)	8 judul
2.	Media Da'wah	1982	Buku Islam (terjemahan)	30 judul
3.	Gema Insani Press	1986	Buku Islam (umum)	50 judul
4.	Pustaka Al-Kautsar	1989	Buku Islam Populer	80 judul
5.	Robbani Press	1993	Buku Islam (terjemahan)	20 judul
6.	Lentera	1995	Buku-buku Da'wah Islam	15 judul
7.	Pustaka Azzam	1997	Buku Islam (umum)	50 judul
8.	Darul Haq	1998	Buku Islam klasik (terjemahan)	20 judul
9.	Hikmah Publishing House	2000	Buku Pemikiran /Pergerakan Islam	15 judul
10.	Serambi Ilmu Semesta	2000	Buku Islam dan fiksi	52 judul

Menurut Krech (Mar'at, 1981: 9, Siagian, 1989: 119-120), sikap adalah pernyataan evaluatif seseorang terhadap objek atau peristiwa tertentu, berupa rasa senang atau rasa tidak senang terhadap objek tersebut. Sementara Eagly dan Chaiken (Sarwono, 1997: 232) berpendapat bahwa sikap merupakan kecenderungan psikologis yang diekspresikan dengan cara mengevaluasi suatu entitas dengan derajat rasa senang atau tidak senang yang kemudian dinyatakan melalui pernyataan sangat positif hingga pernyataan sangat negatif. Penulis berpikir bahwa jika sikap penerbit buku Islam terhadap UU No.4/1990 positif, maka akan berpengaruh positif terhadap pengawasan bibliografi buku Islam (yang direpresentasikan melalui frekuensi cantuman buku Islam dalam BNI

dan KDT), dan sebaliknya bila sikapnya negatif maka akan berpengaruh secara negatif. Penulis mencoba membuktikan kerangka pikir sederhana ini dengan melakukan analisa statistik korelasi dan regresi sederhana antara sikap penerbit buku Islam terhadap UU No. 4/1990 dengan cantuman buku Islam baik dalam BNI maupun KDT.

Jumlah pernyataan dalam angket untuk (skala sikap) penerbit terhadap UU RI No. 4/1990 adalah sebanyak 12 butir dengan skor terendah 1 dan skor tertinggi 5, bila butir-butir pernyataan itu dikonversikan ke dalam skor tersebut maka akan diperoleh hasil skor tertinggi 60 dan skor terendah 12 untuk setiap responden. Adapun rentangan skor dan penafsirannya adalah sbb:

Tabel 3
Rentangan dan Penafsiran
Skor Sikap terhadap UU RI No. 4/1990

No	Rentangan Skor	Penafsiran
1.	12 – 19	Sangat negatif
2.	20 – 27	Negatif
3.	28 – 35	Cenderung negatif
4.	36 – 43	Cenderung positif
5.	44 – 51	Positif
6.	52 – 60	Sangat positif

Data hasil angket tentang skala sikap penerbit Islam terhadap terhadap UU RI. No. 4/1990 diperoleh hasil skor total : 425, rerata : 42,5, variat tertinggi: 53, variat terendah: 32, dan besar rentangan: 21. Karena rerata adalah 42,5 dan berada pada rentangan ke-4, maka secara umum dapat dikatakan bahwa sikap para penerbit buku Islam terhadap UU RI No. 4/1990 adalah cenderung positif.

Hasil dari analisis penghitungan statistik korelasi dan regresi sederhana antara variabel sikap penerbit terhadap UU RI. No. 4/1990 (X1) dengan variabel jumlah cantuman buku Islam dalam BNI (Y1) adalah $0,511 > 0,5$. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh antara sikap penerbit tentang UU RI. No. 4/1990 (X1) dengan jumlah cantuman buku Islam dalam BNI (Y1). Kemudian dari analisa koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai 0,261 atau jika dijadikan persen adalah 2,61%. Ini berarti bahwa variabel bebas secara parsial dapat menjelaskan perubahan variabel sikap penerbit Islam terhadap UU RI. No. 4/1990 (X1) sebesar 2,61%, artinya bahwa sikap penerbit terhadap UU RI. No. 4/1990 (X1) dapat memberikan pengaruh sebesar 2,61% terhadap jumlah cantuman buku Islam BNI (Y1), dan selebihnya yaitu 97,39% dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu, untuk menguji keberartian koefisien regresi dilakukan melalui uji t. Dengan menentukan tingkat kesalahan 5%, dan derajat kebebasan (df) = $10-1 = 9$, didapat $t_{table} = 1,83$. Melalui uji t tersebut diperoleh $t_{hitung} 1,680 < 1,83$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sikap penerbit terhadap UU RI.

No. 4/1990 (X1) tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah cantuman buku Islam dalam BNI (Y1). Demikian juga hasil dari analisis korelasi antara data sikap penerbit terhadap UU RI No. 4/1990 dengan data jumlah cantuman buku Islam dalam KDT diperoleh nilai signifikansi $0,513 > 0,05$. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa variabel sikap penerbit terhadap UU No. 4/1990 tidak berkorelasi dengan jumlah cantuman buku Islam dalam KDT.

Dari bahasan di atas selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap penerbit buku Islam terhadap UU RI No. 4/1990 tidak berkorelasi dengan jumlah cantuman buku Islam baik dalam BNI maupun KDT.

Namun demikian menurut penulis tetap saja bahwa para penerbit buku Islam tersebut telah memiliki kontribusi yang cukup besar dalam upaya pengawasan bibliografi buku-buku Islam di Indonesia, karena mereka telah berupaya untuk mentaati UU No.4/1990. Tanpa kontribusi mereka mungkin saja pengawasan bibliografi terhadap buku-buku Islam ini tidak akan berjalan maksimal. Bahwa jumlah cantuman buku Islam dalam BNI lebih besar dipengaruhi oleh faktor lain di luar sikap para penerbit buku Islam tersebut, itu merupakan hal lain yang perlu dikaji atau diteliti lebih jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Clapp, Verner W. (1994), *Bibliography*. Dalam *Encyclopedia Americana* (3), h. 721-728
- Dahl, Svend (1968), *History of the Book*. 2nd. Ed. Metuchen: The Scarecrow Press.
- Davinson, Donald (1981), *Bibliographic Control*. London: Clive Bingley
- Eryono, Kailani, ed (2009), *Sistem Klasifikasi Islam: Adaptasi dan Perluasan DDC Seksi Islam*.

- Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI.
- Hakim, M. Baqir (2006), *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Al-Huda.
- Kleden, Ignas (1999), *Buku di Indonnesia: Perspektif Ekonomi Politik tentang Kebudayaan*, dalam *Buku dalam Indonesia Baru*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Knowlton, Jack (1997), *Books*, dalam *The New Book of Knowledge*. Connecticut: Grolier Incorporated. Vol. 2, hal. 318-322.
- Leksono, Karlina (1999), *Membaca dan Menulis sebuah pengalaman Eksistensial dalam Buku dalam Indonesia Baru*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Manaf, Tahsinul (2000), *Bibliografi Nasional dalam hubungan dengan Pelaksanaan Undang-undang Deposit*. Media Pustakawan 1 (3), 2000, h. 1-10
- McGowan, Frank M. (1978), *National Bibliography* dalam *Encyclopedia of Library and Information Science*, 51-60
- Pederson, J., (1996), *Fajar Intelektualisme Islam: Buku Dan Sejarah Penyebaran Informasi Di Dunia Arab*. Bandung: Mizan.
- Prytherch, Ray (1990), *Harrold's Librarian's Glossary and Refrence Book*. 7th ed. Aldershot: Gower.
- Stokes, Roy B. (1962), *The Function of Bibliography*. 2nd ed. Aldershot: Gower.
- Stokes, Roy B. (1969), *Bibliography* dalam *Encyclopedia of Library and Information Scienc* vol.2, editor Allen Kent & Harold Lancour. New York: Marcel dekker.
- Sulistiyo Basuki, *A Rethinking of the National Library's Roles in Bibliographic Control in the ICT Age, with Special Refrence to the Region of Southeast Asia*. tersedia di <http://www.sulistiyo-basuki.com/cgi-bin/index.pl?p=001&id=7>, akses tanggal 23 Maret 2006.
- Sulistiyo-Basuki, 1982. *Sejarah Perkembangan Bibliografi di Indonesia*. Analisis Kebudayaan, 3 (2), 99-102.
- Taryadi, Alfons (1999), *Penerbit Indonesia Menghadapi Abad ke-21*, dalam *Buku Dalam Indonesia Baru*. Yayasan Obor Indoneisa, Jakarta.
- Taylor, Arlene G. (1999), *The Organization of Information*. Colorado: Libraries Unlimited.
- Turner, Howard R. (2004), *Sains Islam Yang Mengagumkan*. Bandung: Nuansa.
- Undang-undang No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam*
- Widjanarko, Putut (2000), *Elegi Gutenberg: Buku di era Cyberspace*. Bandung: Mizan.
- Wijanarko, Putut (2003), *Kebangkitan Generasi Baru: Penerbitan Buku Islam dan Masyarakat Islam Indonesia dalam "20 Tahun Madzhab Mizan 1983-2003"*. Bandung: Mizan